

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas pengendara motor berpotensi lebih sering terjadi dibandingkan dengan pengendara mobil, bus dan kendaraan bermotor lainnya. Fenomena berkendara lebih dari dua orang yang di anggap wajar apabila membawa penumpang anak - anak ini, diciptakan oleh masyarakat Indonesia bukan tanpa alasan. Fenomena hukum yang terjadi adalah banyak pengendara bermotor yang membawa penumpang anak- anak atau balita lebih dari dua orang. Peristiwa tersebut paling banyak dijumpai di jalan-jalan alternatif, jalan perkampungan atau pedesaan. Meski begitu ada juga pengendara di jalan raya yang membawa penumpang anak-anak lebih dari dua orang, walaupun tidak banyak. Hal demikian tentu saja dapat memicu angka kecelakaan lalu lintas meningkat akibat aturan pidana yang kurang jelas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mengamati peristiwa hukum atau fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan terstruktur, terhadap aparat penegak hukum dan pengendara sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang yang merupakan balita. Sementara data sekunder berupa data yang siap saji dari instansi terkait serta penelitian yang relevan.

Hasil dari penelitian ini didapat dari Polres Kabupaten Lamongan dengan pembagian usia, jenis kelamin, waktu kejadian, dan jumlah laka lintas secara terperinci. Mulai dari angka kecelakaan ringan, kecelakaan berat, hingga meninggal dunia pada tahun 2019. Hasil wawancara yang didapat diambil dari warga masyarakat Kabupaten Lamongan. Narasumber yang memberikan informasi didominasi oleh pasangan suami istri yang memiliki bayi sesuai fokus pada penelitian ini. Hasil penelitian tersebut adalah pasangan suami istri yang memiliki bayi menganggap bahwa membawa penumpang lebih dari satu diperbolehkan khususnya bayi karena dianggap masih perlu pengawasan dari orang tua. Pasangan suami istri tersebut juga tidak memberi bayi alat pelindung kepala atau helm saat berkendara. Fenomena seperti ini banyak sekali di jumpai pada masyarakat pedesaan khususnya masyarakat Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Asas Kemanfaatan

ABSTRACT

Motorist traffic violations are potentially more common than motorists, buses and other motor vehicles. The incident of driving more than two people who are considered reasonable when carrying passengers of these children, created by the people of Indonesia is not without reason. Legal events that occur are many motorists who carry passengers children or toddlers more than two people. These events are most common in alternative roads, rural or rural roads. However, there are also motorists on the highway who carry more than two children, although not many. This, of course, can trigger the number of traffic accidents to increase due to less obvious criminal rules.

The method used in this study is empirical legal research by observing legal events or empirical facts that occur in society. Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study were obtained from the Lamongan District Police with the division of age, gender, time of occurrence, and the number of traffic luka in detail. Starting from the number of minor accidents, serious accidents, until death in 2019. The results of the interview were taken from the people of Lamongan Regency. Sources who provide information are dominated by married couples who have babies according to the focus on this study. The result of the study is that married couples who have babies consider that carrying more than one passenger is allowed especially infants because it is considered to still need supervision from parents. The couple also did not give the baby head protection equipment or helmets while driving. This phenomenon is found in many rural communities, especially the people of Lamongan Regency.

Keywords : Law Enforcement, Traffic Violation, Expediency Principle

MOTTO

*“MUSUH YANG PALING BERBAHAYA DI ATAS DUNIA INI ADALAH PENAKUT
DAN BIMBANG. TEMAN YANG PALING SETIA, HANYALAH KEBERANIAN DAN
KEYAKINAN YANG TEGUH”
ANDREW JACKSON*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7

1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Sumber Data	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5 Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN ATAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
PELANGGARAN LALU LINTAS	15
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	15
2.1.1 Subjek Penegakan Hukum	18
2.1.2 Objek Penegakan Hukum	19
2.1.3 Penegakan Hukum Pidana	20
2.2 Penegakan Hukum Pidana Lalu Lintas	23
2.2.1 Kejahatan dan Pelanggaran	25
2.2.3 Alur Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas (Tilang) Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016	29
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32
2.3.1 Kesadaran Hukum	34
2.3.2 Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	35
2.3.3 Menangani Para Pelanggar Lalu Lintas	38
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN	
MENGENDARAI SEPEDA MOTOR YANG MEMBAWA	
PENUMPANG BERSAMA BALITA.....	42
BAB IV PENUTUP	64

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
BIODATA PENULIS	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembeda Skripsi

Tabel 2. Data Pelanggaran dari Jenis Roda Dua Tahun 2019

Tabel 3. Jumlah Laka Lantas Tahun 2019

Tabel 4. Data Jenis Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019

Tabel 5. Korban Laka Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Tabel 6. Korban Laka Lantas Berdasarkan Usia Tahun 2019

Tabel 7. Waktu Kejadian Laka Lantas Tahun 2019

Tabel 8. Lokasi Laka Lantas Berdasarkan Status Jalan Tahun 2019

DAFTAR SINGKATAN

Balita	: Bawah Lima Tahun
SNI	: Standart Nasional Indonesia
Kemenperind	: Kementrian Perindustrian
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
SPP Terpadu	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Polantas	: Polisi Lalu Lintas
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk